

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 3
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
Waktu : 10.40 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019;
2. RKA K/L Tahun 2021;
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan
4. Isu-isu Aktual lainnya.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Suparyanti, S.E. (Plt. Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 48 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Menteri Kelautan dan Perikanan);
2. Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.M. (Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan);
3. Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan)
4. Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
5. Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);

6. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan);
7. Ir. Artati Widiarti, M.A. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
8. Dr. TB. Haeru Rahayu (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
9. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
10. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan);
11. Fatah Setiawan Topobroto, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Persero);
12. Farida Mokodompit, Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero); dan
13. Arif Haendra (Direktur Pengembangan PT Garam (Persero)).

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2019, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- 1) Realisasi Pendapatan negara bersih berupa PNBP senilai Rp792.499.187.263,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) atau 96,26% dari estimasi pendapatan – LRA senilai Rp823.303.537.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- 2) Realisasi Belanja negara bersih senilai Rp5.055.148.917.815,00 (lima triliun lima puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima belas rupiah) atau mencapai 91,73% dari alokasi anggaran setelah revisi senilai Rp5.510.787.032.000,00 (lima triliun lima ratus sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah).

b. Neraca

- 1) Nilai Aset senilai Rp26.369.688.908.766,00 (dua puluh enam triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban senilai Rp342.991.147.623,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Sehingga Nilai Ekuitas senilai Rp26.026.697.761.143,00 (dua puluh enam triliun dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

c. Laporan Operasional (LO)

- 1) Pendapatan LO senilai Rp759.032.914.572,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- 2) Beban senilai Rp5.857.773.239.975,00 (lima triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga terdapat Defisit Rp5.381.132.862.908,00 (lima triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah) dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.098.740.325.403,00 (lima triliun sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dan Kegiatan Non Operasional senilai Rp282.392.537.505,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas akhir sebesar Rp26.026.697.761.143,00 (dua puluh enam triliun dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 13a/LHP/XVII/05/2020 tanggal 20 Mei 2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk selalu memperbaiki

kualitas laporan keuangan dengan melakukan penyempurnaan beberapa hal yang memerlukan tindak lanjut dan penguatan.

3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp6.652.139.393.000,00** (enam triliun enam ratus lima puluh dua miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) TA.2021 Kementerian Keuangan Nomor: S-692/MK.02/2020 dan Kementerian PPN/Bappenas B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Peyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan pagu alokasi anggaran Tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar **Rp3.286.000.000.000,00** (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar rupiah).
5. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebesar **Rp1.000.000.000.000,00** (satu triliun rupiah) dengan rincian:
 - a. DAK Provinsi sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. DAK Kabupaten/Kota sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah).
6. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menginventarisasi dan mendata seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar di Indonesia sehingga kepemilikan aset negara menjadi legal dan pengelolaannya menjadi efektif efisien, serta sarana prasarannya dapat ditingkatkan.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produksi kelautan dan perikanan tahun 2021, sehingga pelaku usaha perikanan dapat bertahan dan mampu bangkit ekonominya akibat pandemi COVID-19.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meneruskan program dan kegiatan yang bersifat padat karya di setiap unit Eselon I teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti: Benih ikan,

Minapadi, Bioflok, Pakan Ikan Mandiri, Gemarikan, Chest Freezer, Kapal Nelayan, Alat Tangkap Ikan, Bakti Nelayan, Bakti Mutu Karantina, Apartemen Ikan/Udang, Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Bahari, Gerakan Cinta Laut (Bersih Pantai), Kelompok Penggerak Konservasi, Kelompok Masyarakat Pengawas, dan kegiatan lainnya.

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kegiatan pengerukan sedimentasi di pelabuhan perikanan di Indonesia yang terjadi pendangkalan alur kapal nelayan.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasukkan menu dalam kriteria teknis dan mengalokasikan anggaran di Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan tangkap di kabupaten/kota dan provinsi, seperti TPI, PPI, dan PPP.
11. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan publikasi (branding) secara intens terkait manfaat ikan hasil sumber daya perikanan Indonesia yang tidak kalah dengan produk luar negeri, baik melalui media elektronik, TV, maupun media cetak.
12. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI (November 2019 s.d. Agustus 2020), baik kunjungan kerja pada masa reses maupun kunjungan kerja spesifik dalam bentuk tanggapan tertulis.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB.

Menteri Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

Dr. Edhy Prabowo, M.M., M.B.A.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151